

KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PENGUSAHA BATU BATA DI DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

Dijan Rahajuni^{1*}, Ratna Setyawati Gunawan¹, Novita Mardani¹

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

* Email Corresponding : dijan_rahajuni@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan bahan baku diantaranya yang utama adalah batu bata merah. Batu bata merah merupakan kegiatan usaha sektor informal, berbahan baku lokal dan dijadikan sumber pendapatan keluarga. Keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, akan semakin membutuhkan batu bata merah sebagai bahan baku pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan dan distribusi pendapatan pengusaha batu bata merah, dilihat dari tingkat pendapatan dan angka Indeks Gini. Tingkat pendapatan pengusaha batu bata merah berdasarkan garis kemiskinan perdesaan secara nasional tahun 2020, yaitu sebesar 437 902 rupiah masih terdapat 1 keluarga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan dan 3 keluarga yang pendapatannya masih di bawah UMK kabupaten Banyumas tahun 2020. Distribusi pendapatan keluarga mereka dalam kategori merata, namun apabila hanya dilihat dari pendapatan usaha batu bata merah saja, ketidakmerataan distribusi pendapatannya berada dalam kategori ketidakmerataan yang tinggi, kondisi pemerataan pendapatan keluarga yang merata karena didukung oleh pendapatan lain dengan tingkat pemerataan pendapatan yang tinggi.

Kata Kunci : batu bata merah, sektor informal, bahan baku lokal, kemiskinan, distribusi pendapatan, indeks gini

ABSTRACT

Infrastructure facilities development requires raw materials, one of the main is red bricks. Red bricks manufacturing is an informal sector business activity made from local raw materials and used as a source of family income. The success of development, which is indicated by economic growth, will increasingly require red bricks. This study aims to analyze poverty and income distribution of red bricks manufacturers, in terms of income level and Gini Index. Income level of red brick manufacturers based on the national rural poverty line in 2020 is 437,902 Rupiah, there is still 1 family whose income is below the poverty line and 3 families whose income is still below the Banyumas District's minimum wages in 2020. The income distribution of their families is in the equal category. However, in terms of the sole income from the red bricks manufacturing, there is inequality of income distribution in the high inequality category. The condition of equal income distribution of the families is due to supported by other incomes with a high level of equal income distribution.

Keywords: red bricks, informal sector, local raw materials, poverty, income distribution, Gini Index

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong (Pyburn & Woodhill, 2014). Peningkatan kualitas hidup dapat terjadi apabila ada daya beli, terpenuhinya daya beli mengantarkan pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Untuk dapat mempunyai daya beli orang harus memiliki kegiatan ekonomi yang produktif.

Usaha kerajinan batu bata merupakan salah satu kegiatan ekonomi produktif yang berbasiskan pada sumber daya ekonomi lokal, berupa sumber daya alam tanah liat yang diolah sedemikian rupa menjadi batu bata. Manfaat batu bata adalah sebagai bahan baku untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan manusia seperti rumah, jembatan, saluran air, pabrik, pasar, stasiun, terminal, bandara dan sebagainya. Oleh usaha industri batu bata sangat dibutuhkan, meskipun pada saat ini sudah terdapat batu bata yang berbahan batu semen.

Di kabupaten Banyumas industri batu bata termasuk salah satu potensi industri dan termasuk dalam kegiatan usaha sektor informal. Pada Tabel 1, terlihat dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas industri batu bata terdapat di 6 kecamatan. Kecamatan Sokaraja merupakan kecamatan dengan perajin batu bata terbanyak. Dari 278 pengrajin yang ada di Kabupaten Banyumas, 78 pengrajin (28 persen) terdapat di Kecamatan Sokaraja. Di Kecamatan Sokaraja dari 18 desa, terdapat 7 desa yang ada pengrajin batu bata, dari ketujuh desa tersebut Desa Wiradadi merupakan desa dengan jumlah pengrajin batu bata terbanyak, yaitu 30 pengrajin (38,5 persen). Industri batu bata di Desa Wiradadi termasuk dalam industri mikro berskala rumah tangga karena rata-rata tenaga kerjanya 3 orang.

Tabel 1. Data Jumlah Industri Batu Bata di Lokasi Pengembangan Industri Batu Bata di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Industri	Persentase
1.	Ajibarang	3	1
2.	Sokaraja	78	28
	Desa :		
	1. Karangkedang	5	6
	2. Karangduren	6	8
	3. Kalikidang	6	8
	4. Kaligondang	13	17
	5. Karangrau	2	3
	6. Pamijen	16	20
	7. Wiradadi	30	38
3.	Kembaran	47	17
4.	Jatilawang	74	27
5.	Sumpiuh	2	1
6.	Kebasen	74	26
	Jumlah	278	100

Sumber: Dinas Industri Kabupaten Banyumas, 2019

Sedikitnya jumlah perajin batu bata menurut Winarto (2020) karena pendapatan yang diperoleh dari usaha batu bata tergolong rendah, namun demikian menurut Hidayah (2018), alasan pengrajin menekuni usaha pembuatan bata merah karena di desa sulit untuk

mendapatkan pekerjaan sehingga mereka memilih bekerja sebagai pengrajin batu bata merah. Alasan memilih usaha batu bata merah yaitu adanya ketersediaan bahan baku, tersedianya lokasi untuk pembuatan bata merah, tidak memerlukan keterampilan khusus dan bata merah juga bukan termasuk barang yang mudah rusak apabila belum laku terjual (Kurniati, Susilowati, & Suharno, 2019).

Dalam kegiatan usaha yang termasuk dalam industri kerajinan terdapat 3 masalah yang dihadapi perajin, yaitu : belum adanya target pasar dan target produksi, keterbatasan dalam permodalan dan bidang administrasi usaha, keterbatasan dalam ketrampilan dan teknologi. Berbagai keterbatasan ini akan berdampak pada pendapatan usaha. Pendapatan usaha yang rendah menyebabkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup juga rendah, tidak terpenuhinya kebutuhan akan menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan pengusaha batu bata dan kondisi distribusi pendapatan diantara mereka. Keterbaruan penelitian ini terletak pada sisi responden, yakni pada penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan responden adalah para pengrajin, pada penelitian ini sebagai responden para pengusaha.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga ini dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi keluarga dan faktor eksternal yaitu terhindarnya keluarga dan anggota keluarga dari goncangan dan ketegangan jiwa (Astuti, 2017)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan digolongkan dalam keluarga miskin. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga di ukur melalui pengeluaran perkapita anggota keluarga, dimana pengeluaran ini didasarkan atas daya beli dan atau pendapatan. Pendapatan perkapita anggota keluarga adalah jumlah pendapatan keluarga dibagi dengan anggota keluarga. Besarnya pendapatan perkapita dikategorikan tidak miskin di perdesaan pada September 2020 sebesar 437.902 rupiah perbulan, batas pendapatan sebesar 437 902 rupiah adalah sebagai batas garis kemiskinan (BPS,2020). Disisi lain berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2003 pemberian upah kepada buruh harus dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak yang dituangkan dalam kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan serikat buruh dan ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dinyatakan sebagai batasan Upah Minimal Kota/ Kabupaten (UMK), besarnya jumlah UMK di Kabupaten Banyumas 1.970.000 rupiah (Portal Berita Provinsi Jawa Tengah November 2020).

Pada kegiatan usaha kerajinan pendapatan pengrajin diperoleh dari hasil penjualannya dikurangi dengan biaya-biaya produksinya, meliputi biaya tetap (*fix cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*). Eva Marthinu dan La Pandi Buton (2019) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan pada umumnya kemampuan dalam kategori sedang. Hal karena tingkat pendapatannya hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan jangka pendek. Apabila suatu saat terjadi goncangan produksi karena satu dan lain hal, maka pengrajin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dilihat dari sisi kontribusi pendapatan pengrajin terhadap pendapatan keluarga menurut Endang Sutrina, 2014 pada pengrajin anyaman pandan dalam kategori kecil. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Abdul Hafis, 2017 pada penelitiannya tentang Perubahan Mata pencaharian Masyarakat Dari Petani Ke Pengrajin Batu Bata Di Dusun Dasanbaru Desa Lenekdaya Kecamatan Aikmel.

Kecilnya kontribusi pendapatan pengrajin karena pengrajin menganggap bahwa kegiatan usaha kerajinan adalah sebagai usaha sampingan, demikian pula pada industri batu bata, pengrajin menganggap bahwa bekerja pada kerajinan batu bata adalah sebagai pekerjaan tambahan, namun demikian menurut Husain Najmi Fuadi dan M. Yustafad, 2020. usaha kerajinan batu bata rata-rata dapat mendapatkan pendapatan sebesar 2.205.555, 56 rupiah per bulan, jumlah pendapatan ini sudah di atas UMK Jatim sebesar 2.016.781 rupiah tahun 2020.

Dari berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksamaan pendapatan, ketidaksamaa pendapatan dapat menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai pengrajin. Ketidakmerataan distribusi pendapatan diukur dengan Gini Rasio atau Indeks Gini (IG). Kondisi IG di perdesaan Indonesia tergolong dalam ketidakmerataan yang rendah namun menunjukkan kondisi ketidakmerataan yang semakin meningkat, pada September 2019 angka IG sebesar 0,315 dan pada September 2020 angka IG sebesar 0,319 (BPS, 2020). Angka IG di bawah 0,40 menunjukkan ketimpangan yang rendah (Kuncoro Mudrajat, 2015). Ketimpangan juga terjadi di daerah perkotaan, di daerah perkotaan tingkat ketimpangan lebih timpang di dibandingkan di daerah perdesaan. Pada September 2019 tingkat ketimpangan di perkotaan 0,391 dan tahun 2020 0,399. Dengan demikian selama tahun September 2019 - 2020 baik di perdesaan maupun diperkotaan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat meningkat. Ketimpangan pendapatan pada orang miskin di perdesaan lebih besar dari pada ketimpangan pendapatan pada orang miskin perkotaan, dengan kategori ketimpangan pendapatan di perkotaan berada dalam kategori rendah dan di perdesaan dalam kategori menengah (Rahajuni Dijan, 2017).

Pada industri kerajinan ketimpangan pendapatan juga terjadi seperti misalnya pada industri kerajinan bambu di Kabupaten Sleman, tingkat ketimpangan pendapatannya yang diukur dengan IG mencapai 0,448 dan ini tergolong dalam ketimpangan pendapatan yang tinggi atau pendapatan para pengrajin sangat tidak merata. Padahal apabila dilihat dari kontribusi pendapatan industri tersebut terhadap pendapatan keluarga mencapai mencapai 75,55 persen, Nurul Trya Wulandari, Dwidjono Hadi Darwanto, dan Irham, 2015. Melihat besarnya kontribusi pendapatan kerajinan bamboo menunjukkan bahwa usaha kerajinan bambu merupakan usaha pokok. Lain halnya pada penelitian Saputra Adi wahyu, 2020 pada sektor pertanian yaitu kakao di Kabupaten Gunungkidul pendapatan usaha tani ini hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 16,90 persen terhadap pendapatan keluarga, yang berarti kontribusinya rendah.

Antar gender pun terdapat ketimpangan pendapatan, baik ketimpangan pendapatan dalam keluarga maupun dalam usaha. Penelitian Rahajuni, Abdul Aziz Ahmad dan Muhammad Ammar Allam, 2019 menyatakan bahwa pada pedagang kaki lima di kawasan pasar minggu pagi Gelanggang Olah Raga Satria, Purwokerto Secara keseluruhan ketidakmerataan pendapatannya dalam kategori tinggi, namun pada responden perempuan tingkat ketidakmerataan pendapat keluarganya lebih tinggi dari pada tingkat ketidakmerataan pendapatan keluarga responden laki-laki, artinya pada pedagang perempuan terdapat ketidakmerataan pendapatan keluarga yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kemeraan pendapatan keluarga pedagang laki-laki. Demikian pula dilihat dari pendapatan usahanya, ketidakmerataan pendapatan pedagang kaki lima perempuan lebih tinggi dari pada tingkat ketidakmerataan pendapatan pedagang kaki lima laki-laki.

Dengan demikian maka ketidakmerataan pendapatan terdapat dalam berbagai sisi baik dilihat dari kewilayahan, jenis usaha dan juga jender. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran, namun yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai ketidakmerataan pendapatan terjadi sangat mencolok atau timpang sekali. Kondisi ketimpangan yang sangat mencolok dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar berbagai sisi tersebut. Disamping itu juga perlu diupayakan agar dalam kondisi ketimpangan, masyarakat yang berpendapatan rendah harus dapat mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan dengan kata lain perlu di upayakan agar pendapatan perkapita berada di atas garis kemiskinan.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Kemiskinan adalah merupakan suatu kondisi dimana pengeluaran konsumsi berada di bawah tingkat pengeluaran yang sudah ditentukan dalam hal ini yang menentukan adalah BPS (Tambunan Tulus, 2011) . Kemiskinan terjadi karena ketiadaan daya beli karena rendahnya pendapatan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu rata-rata tingkat kehidupan para pengusaha batu bata merah sudah berada di atas garis kemiskinan nasional sesuai dengan kriteria BPS tahun 2020 yaitu 437 902 rupiah perbulan. Tingkat pendapatan keluarga pengusaha sudah diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 1.970.000 rupiah, namun terdapat ketidakmerataan pendapatan dalam kategori yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer, dengan responden para pengrajin batu bata merah di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas, yang dilakukan dengan metode sensus dengan responden sebanyak 24 orang pengrajin. Hal ini dapat terjadi karena pada waktu penelitian di lapangan ternyata dari 30 pengrajin yang terdata hanya ada 24 pengrajin. Penelitian dilakukan pada Oktober 2020.

Tehnik Analisis Data

Tingkat kemiskinan pengrajin batu bata merah diukur dengan membandingkan pendapatan perkapita anggota keluarga pengrajin dengan garis kemiskinan dari BPS pada September 2020, yaitu sebesar 437 902 rupiah untuk daerah perdesaan, secara nasional. Tingkat kesejahteraan diukur dengan dibandingkan UMK Kabupaten Banyumas tahun 2020 yaitu 1.970.000 rupiah dengan pendapatan keluarga, jika sudah berada diatas ketentuan tersebut maka dikatakan tidak miskin dan atau sejahtera. Ketidakmerataan pendapatan diukur dengan IG.

Pendapatan perkapita,

Untuk menghitung pendapatan perkapita diadopsi dari Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Kuncoro Mudrajat, 2015) dengan formula :

$$Y_{\text{perkapita}} = \frac{Y_t}{Pop_t}$$

Y_t = total pendapatan keluarga

Pop_t = jumlah anggota keluarga

Pendapatan keluarga, dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga dari usaha dan pendapatan lainnya.

Pandapatan usaha batu bata dihitung (Madura Jeff, 2001) dengan :

$$\pi = TR - TC$$

π = Keuntungan (*Profit*)

TR = Total Penerimaan (*Total Revenue*)

$$= P \times Q$$

TC = Total Biaya (*Total Cost*)

= Biaya tetap + biaya variabel

$$= FC + VC$$

Distribusi Pendapatan

Menghitung distribusi pendapatan, digunakan analisis Indeks Gini (Kuncoro Mudrajat, 2015) sebagai berikut :

$$IG = \sum_{t=1}^{n-1} (\eta_{t+1} \prod_t) - (\eta_1 \prod_{t+1})$$

Dalam menghitung IG data dibagi menjadi 5 kelas, η adalah pangsa kumulatif pendapatan, π pangsa kumulatif penduduk. Nilai IG antara 0 – 1, jika IG dibawah 0,4 ketimpangan rendah dan jika lebih dari 0,4 ketimpangan tinggi.

HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Responden

Responden adalah para pengusaha batu bata merah, mereka adalah para kepala keluarga yang berjumlah 24 orang, dengan rentang usia 30 sampai dengan 69 tahun. Terbanyak diantara mereka berusia antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun yaitu 54,17 persen, yang tergolong usia tua 60 tahun sampai 69 tahun hanya 8,33 persen. Tingkat pendidikan responden tergolong masih rendah karena 75 persen diantara mereka hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga mereka 3 orang. Jumlah anggota keluarga responden rata-rata 3 orang, paling banyak 6 orang dan paling sedikit 2 orang. Dalam menjalankan kegiatan usaha responden mempekerjakan rata-rata 3 orang tenaga kerja.

Pendapatan Pengusaha Batu Bata Merah

Untuk menjalankan usaha batu bata merah kebutuhan modal awal yang mereka butuhkan rata-rata 15.875.000 rupiah, terbanyak menyediakan modal 85 juta rupiah dan yang terendah menyediakan modal 5 juta rupiah, 79 persen diantara mereka modalnya di bawah rata-rata. Modal awal ini digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya tetap usaha (*Fix Cost*) yang terdiri dari Tungku pembakaran atau tobong rata-rata seharga 6 juta rupiah dengan masa pakai rata-rata 10 tahun, sewa tanah rata-rata 117.625 rupiah perbulan, mesin peluluh bata dengan harga rata-rata 6.479.167 rupiah, pencetak bata dengan harga rata-rata 105 ribu dan cangkul dengan harga rata-rata 90.500 rupiah.

Untuk biaya tidak tetap atau biaya variabel (*variabel cost*) yang dibutuhkan meliputi tenaga kerja, tanah liat, abu, serbuk kayu, air, bahan bakar yang terdiri dari sekam dan kayu bakar, plastik penutup bata dan biaya transportasi. Dalam satu bulan rata-rata dapat memproduksi 31.875 buah batu bata dan dijual dengan harga 475 rupiah per buah. Biaya produksi perbulan usaha batu bata merah perbulan sebagaimana tertera pada Tabel 2. Biaya Produksi Batu Bata Merah Perbulan (Rupiah)

Tabel 2. Biaya Produksi Batu Bata Merah Perbulan (Rupiah)

		Jenis Biaya	
<i>Variabel Cost</i>		<i>Fix Cost</i>	
1. Biaya bahan Baku		1. Biaya Penyusutan alat	
-Tanah Liat	993.750	-Cangkul	47.014
-Abu	2.770.833	-Mesin luluh adonan batu bata	84.375
-Serbuk Gergaji	1.362.500	-Pencetak batu bata	20885
-Air	22.375	-Tobonng/tungku pembakaran	58.465
2. Biaya Bahan Bakar		2. Biaya sewa lahan	117.625
-kayu	141.667		
-Sekam	3.712.500		

Jenis Biaya		
<i>Variabel Cost</i>		<i>Fix Cost</i>
3. Biaya tenaga kerja	2.754.167	
4. Biaya transportasi	18.542	
5. Plastik Penutup	509.458	
Jumlah	12,285,792	328.666
Perbandingan	37	1

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dalam usaha batu bata merah pada awal usaha biaya usaha yang banyak dibutuhkan adalah untuk pengadaan peralatan tetap, rata-rata membutuhkan biaya 15.875.000 rupiah. Setelah proses produksi biaya tidak tetap lebih banyak dibutuhkan, perbandingan antara kebutuhan biaya tetap dalam hal ini dihitung dari biaya penyusutan perbulan dengan biaya variabel 1 : 37 ; biaya penyusutan peralatan perbulan 328.666 rupiah dan biaya variabel perbulan 12.285.792 rupiah.

Dari 24 pengusaha batu bata merah total produksi perbulan produksi 765.000 buah atau rata-rata perpengusaha dapat memproduksi 31.875 buah dengan harga perbuah antara 500 rupiah sampai dengan 450 rupiah, rata-rata harga jual perbuah 475 rupiah, namun demikian 12 orang pengusaha menjual dibawah harga rata-rata. Total penerimaan penjualan batu bata merah 362.400.000 rupiah atau rata-rata 15.100.000 rupiah, pengusaha dengan penerimaan penjualan diatas rata-rata hanya 2 orang, 22 orang pengusaha batu bata merah penerimaan penjualannya di bawah rata-rata. Setelah dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap maka keuntungan yang merupakan pendapatan dari para pengusaha rata-rata 2.485.541 rupiah, 17 pengusaha pendapatannya di bawah rata-rata dan 7 pengusaha pendapatannya di atas rata-rata.

Pendapatan perkapita

Rata-rata pendapatan keluarga pengusaha batu bata merah yang bersumber dari usaha batu bata merah 2.485.541 rupiah, rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga pengusaha batu bata merah yang bersumber dari usaha batu bata merah 806,121 rupiah. Namun demikian keluarga pengusaha batu bata merah tidak hanya mengandalkan pendapatannya dari batu bata, terdapat sumber pendapatan keluarga lain yaitu dari hasil pertanian dan berdagang. Rata-rata sumber pendapatan lain keluarga sebesar 1,692,719 rupiah, pendapatan perkapita rata-rata dari sumber pendapatan lain 548.989. Dengan demikian maka rata-rata total pendapatan keluarga pengusaha batu bata merah 4.178.260 rupiah, rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga pengusaha batu bata merah 1.355.110 rupiah.

Distribusi Pendapatan Pengusaha Batu Bata Merah

Tabel 3 tertera pengelompokan pendapatan pengusaha batu bata merah digolongkan menjadi pendapatan rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 3. Jumlah pengusaha sesuai dengan kelompok pendapatan keluarga per bulan dan Indeks Gininya (IG)

Pengelompokan Pendapatan	Rendah	Sedang	Tinggi	IG
Usaha batu bata merah	18	5	1	0,42
Pendapatan lain	10	10	4	0,34
Pendapatan keluarga	14	7	3	0,22

Sumber : Data primer diolah

Pada usaha batu bata merah pendapatan terendah 317.000 rupiah dan tertinggi 9.844.000 rupiah, kelompok pendapatan rendah adalah mereka yang pendapatannya kurang dari 3.492.667 rupiah dan kelompok pendapatan tinggi adalah yang pendapatannya lebih dari

6.668.333 rupiah. Pendapatan lain adalah pendapatan yang bukan berasal dari usaha batu bata, misal dari hasil pertanian dan berdagang, pendapatan lain mereka terendah 25.250 rupiah dan pendapatan tertinggi 4.800.000 rupiah. Pendapatan lain termasuk kategori rendah yaitu pendapatan di bawah 1.616.944 rupiah dan kategori tinggi pendapatan diatas 3.208.639 rupiah. Pendapatan keluarga adalah penjumlahan antara pendapatan dari usaha batu bata merah dan pendapatan lain, pendapatan keluarga terendah sebanyak 1.040.000 rupiah dan tertinggi 9.903.333 rupiah, kategori rendah untuk pendapatan keluarga, yaitu pendapatan dibawah 3.944.000 rupiah dan tinggi pendapatan di atas 6.948.000 rupiah.

Kondisi ketidakmerataan distribusi pendapatan pada usaha batu bata merah dihitung melalui Indeks Gini menghasilkan angka indeks 0,42, ketidakmerataan pendapatan dihitung dari pendapatan lain yang diperoleh pengusaha batu bata merah menghasilkan angka indeks 0,34 dan secara total pendapatan keluarga pengusaha batu bata merah Indeks Gininya 0,22.

Penerimaan dan penolakan Hipotesis

Hipotesis yang menyatakan tingkat hidup rata-rata keluarga dan anggota keluarga pengusaha batu bata merah sudah berada di atas garis kemiskinan nasional diterima. Hal ini karena rata-rata pendapatan keluarga pengusaha batu bata merah sebanyak 1.355.111 rupiah dan rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga 548.989 rupiah, garis kemiskinan nasional adalah 437 902 rupiah.

Hipotesis mengenai rata-rata tingkat pendapatan keluarga yang sudah berada di atas KHL diterima. Hal ini karena rata-rata pendapatan keluarga mereka masih berada di atas KHL, yakni 4.178.260 rupiah dan pendapatan sesuai KHL adalah 1.970.000 rupiah.

Hipotesis yang menyatakan kondisi ketidakmerataan pendapatan pengusaha batu bata merah diukur dari Indeks Gini tinggi tinggi diterima, karena angka Indeks Gini 0,42. Namun kalau dilihat kondisi ketidakmerataan dari total pendapatan keluarga pengusaha batu bata menunjukkan angka 0,22 yang berarti ketidakmerataannya rendah.

Pembahasan

Meskipun rata-rata tingkat pendapatan perkapita anggota keluarga pengusaha batu bata merah sudah berada di atas garis kemiskinan namun masih terdapat tiga keluarga yang dengan jumlah anggota keluarga sembilan orang atau 12,16 persen orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Secara rinci rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga pengusaha batu bata merah 1.356.110 rupiah, yang terdiri dari usaha batu bata merah 806.121 rupiah dan pendapatan lain 549.989 rupiah. Dengan demikian maka pendapatan lain berkontribusi sebesar 40,56 persen terhadap rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga. Pada usaha pengusaha kecil seperti usaha batu bata merah ini untuk dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran perkapita dibutuhkan sumber pendapatan lain, tidak hanya mengandalkan usaha pokoknya saja. Hal ini terlihat setelah adanya pendapatan lain maka jumlah keluarga yang masih dalam kategori miskin hanya satu keluarga dengan anggota keluarga sebanyak tiga orang.

Dikaitkan dengan KHL juga terdapat tiga keluarga yang pendapatannya berada di bawah KHL kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 1.970.000 rupiah, meskipun secara rata-rata semua responden pendapatannya sudah di atas KHL, yakni 4,178,260 rupiah. Namun demikian apabila dilihat per responden maka terdapat tiga (12,5 persen) responden yang pendapatannya di bawah KHL, rata-rata pendapatan keluarga ketiga responden tersebut 1.547.083 rupiah atau hanya 37,07 persen dari rata-rata pendapatan total keluarga responden. Hal ini dapat terjadi karena dua responden yang pendapatannya di bawah KHL hanya mengandalkan pada usaha pokoknya saja, dan satu responden dalam menjalankan usaha pokok harga penjualan produk yang dihasilkan masih berada di bawah harga rata-rata. Dari sejumlah 4,178,260 rupiah pendapatan rata-rata keluarga 40,51 persen berasal dari kontribusi pendapatan sumber lain.

Kondisi distribusi pemerataan pendapatan responden diukur melalui Indeks Gini, dilihat dari total pendapatan keluarga berada dalam kategori ketidakmerataan atau ketimpangan

yang rendah ($IG = 0,22$), namun jika dilihat dari pendapatan usaha batu bata merahnya saja kondisi pemerataan pendapatan mereka dalam kategori ketidakmerataan atau ketimpangan yang tinggi ($0,42$). Kondisi ketimpangan yang rendah pada total pendapatan responden dapat terjadi karena ditopang oleh pendapatan lain, kategori ketimpangan pada pendapatan lain berada dalam kategori yang rendah ($0,34$). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya pendapatan lain mampu membantu mempersempit tingkat ketidakmerataan pendapatan.

KESIMPULAN

Kondisi kemiskinan pengusaha batu bata merah dilihat dari rata-rata pendapatan perkapitanya sudah diatas garis kemiskinan nasional tahun 2020 namun masih terdapat 12,16 reponden yang pendapatan perkapitanya berada di bawah garis kemiskinan nasional. Sementara dikaitkan dengan KHL maka rata-rata pendapatan responden sudah diatas KHL kabupaten Banyumas 1.970.000 rupiah. Ketidakmerataan pendapatan responden berada dalam kategori ketidakmerataan yang rendah. Kondisi ini karena didukung adanya pendapatan lain, kontribusi pendapatan lain terhadap rata-rata pendapatan perkapita anggota keluarga mencapai 40,56 persen dan terhadap pendapatan keluarga 40,51 persen.

SARAN

Untuk meningkatkan pendapatan pengusaha dalam ketegori pengusaha kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan diperlukan kecermatan dalam mengelola produksi dan menentukan harga jual produk. Untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit ketidakmerataan pendapatan usaha informal dalam skala rumah tangga hendaknya tidak pengandalkan pada usaha pokok saja perlu diupayakan adanya sumber pendapatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafis. (2017). Perubahan mata Pencaharian Masyarakat Dari Petani Ke Pengrajin Batu Bata Di Dusun Dasanbaru Desa Lenekdaya Kecamatan Aikmel Dalam Tinjauan Ekonomi. Jurnal Society Jurusan Pendidikan IPS Ekonom, Edisi XVII, hal 1-20.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Kemiskinan Indonesia. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>)
- Endang Sutrina. (2014). Kontribusi Usaha Kerajinan Anyaman Pandan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pengrajin Di Desa Buluhnipis Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. jurnal aplikasi bisnis, Vol. 4 (2), Hal. 2014, 58 – 68.
- Eva Marthinu dan La Pandi Buton. (2019). Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Gerabah Di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan. Jurnal GoeCivic, Vol. 2 (1), Hal. 157-162.
- Hidayah, S., Sugianta, I. G., & Suwarni, N. (2018). Profil Kepala Keluarga Pengrajin Bata Merah di Desa Kalijero Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6(3), 1-15.
- Husain Najmi Fuadi, M. Yustafad. (2020). Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Legitimasi, Vol.2 (2), Hal. 217 – 243.
- Kuncoro Mudrajat (2015). *Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kurniati, E. D., Susilowati, I., & Suharno. (2019). Sustainable Competitive Advantage of SMEs through Resource and Institutional-Based Management: An Empirical Study of Batik SMEs in Central Java, Indonesia. Market-Tržište, 31(1), 61-82.
- Madura Jeff. (2001). Pengantar Bisnis. Salemba Empat, Jakarta.

- Nurul Trya Wulandari, Dwidjono Hadi Darwanto, dan Irham. (2015). Analisis Nilai Tambah dan Kontribusi Kerajinan Bambu Pada Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Sleman. *Agro Ekonomi*, Vol. 26(2), Hal. 292 – 295.
- Portal Berita Provinsi Jawa Tengah. (2020). November UMK Di Jateng Naik hingga 3,68 persen. <https://jatengprov.go.id/publik/umk-2021-di-jateng-naik-hingga-368-persen/>
- Pyburn & Woodhill. (2014). *Dynamics of Rural Innovation*. Royal Tropical Institute, Amsterdam
- Rahajuni Dijan, Abdul Ahmad Aziz, Muhamad Ammar Allam. (2019). Contribution of Income, Equitable Income and Welfare of Street Vendors' Family at Sunmor GOR Satria Market Purwokerto by Gender. *Jame*, Vol. 21 (2), Hal. 34 – 41.
- Rahajuni Dijan, Suprpto, Siti Badriah Lilis, Rafinda Ascaryan. (2017). Inequality of Income Distribution in Rural and Urban Poor Communities. *EKO-REGIONAL*, Vol. 12 (2), Hal. 50-56
- Ribut Wijoto (2020). Dewan Pengupahan Bojonegoro Sepakati UMK 2021 Naik 3,27 Persen. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dewan-pengupahan-bojonegoro-sepakati-umk-2021-naik-327-persen/>
- Tambunan Tulus. (2011). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyu Adhi Saputro, Wiwik Sariningsih. (2020). Kontribusi Pendapatan Usahatani Kakao Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Agribisnis (SEPA)*. Vol. 16 (2), Hal. 208 – 217.